



KEMENPORA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA 2025



**ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI
KEPRAMUKAAN ORGANISASI DAN
KOMUNITAS PEMUDA**

LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI KEPRAMUKAAN,
ORGANISASI DAN KOMUNITAS PEMUDA**

**DEPUTI BIDANG PELAYANAN PEMUDA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**“Bantu orang muda, Bantu orang kecil, Karena orang kecil akan besar.
Orang muda akan memiliki benih yang anda taburkan di pikiran mereka dan ketika
mereka tumbuh, mereka akan mengubah dunia” – Jack Ma**

**MEDIA PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNIT ORGANISASI
SERTA MERUPAKAN PIRANTI UNTUK MENGUKUR KEBERHASILAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI KEPRAMUKAAN,
ORGANISASI DAN KOMUNITAS PEMUDA
SELAMA 1 (SATU) TAHUN
SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNGJAWABAN KINERJA**

KATA PENGANTAR



ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI KEPRAMUKAAN, ORGANISASI DAN KOMUNITAS PEMUDA

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah atas kinerja penyelenggaraan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2025. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Informasi tersebut mencakup kinerja strategis, kinerja operasional, dan kinerja keuangan.

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun berlandaskan ketentuan yang tertuang dalam *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014* tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014* mengenai Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Proses penyusunan laporan ini melibatkan berbagai pihak dan dilakukan dengan penuh komitmen untuk menghadirkan data serta informasi yang relevan, akurat, dan transparan dalam mendukung pengelolaan program dan kegiatan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga dengan rendah hati kami membuka ruang bagi kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Akhirnya, besar harapan kami agar laporan ini juga memberikan manfaat nyata sebagai sumber informasi bagi para pengambil kebijakan, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program dan kegiatan di masa mendatang.



Jakarta, Januari 2026
Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan,
Organisasi dan Komunitas Pemuda,
KEMENPORA
REPUBLIK INDONESIA

Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng

DAFTAR ISI

Laporan Kinerja 2025

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	4
1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur	8
1.4 Potensi Permasalahan.....	9
1.5 Sistematika Pelaporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
2.1 Rencana Strategis dan Pohon Kinerja.....	14
2.2 Rencana Kerja.....	15
2.3 Indikator Kinerja Utama	17
2.4 Perjanjian Kinerja	18
2.5 Postur Anggaran	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1 Pengukuran Kinerja	25
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	25
3.2.1 Indikator Kinerja 1.....	29
3.2.2 Indikator Kinerja 2.....	36
a. Partisipan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)	37
b. Partisipan Indonesia Sport Summit (ISS)	38
c. FGD Pembangunan Karakter Kepemudaan	39
3.2.3 Indikator Kinerja 3.....	41
3.2.4 Indikator Kinerja 4.....	48
a. Nilai Manfaat Kegiatan Komunitas Fest.....	49
3.3 Realisasi Anggaran	52
3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya	52

3.5	Dukungan Terhadap Prioritas Nasional	55
a.	Bantuan Organisasi Kepemudaan (Good Game).....	55
b.	Partisipan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)	55
c.	Partisipan Indonesia Sport Summit (ISS)	56
d.	FGD Karakter Pengembangan Pemuda.....	56
e.	Bantuan Lembaga Kepemudaan.....	56
f.	Bantuan Lembaga Kepemudaan (Komunitas Fest).....	56
	BAB IV PENUTUP	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan	59
	LAMPIRAN	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	8
Gambar 2 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda	21
Gambar 2 Kegiatan Gerbangtara, Good Game, dan Klub Berkawan.....	35
Gambar 3 Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Masyarakat	37
Gambar 4 Pelatihan di Bali.....	43
Gambar 5 Pelatihan di Banten.....	43
Gambar 6 Pelatihan di Jawa Barat	43
Gambar 7 Pelatihan di Yogyakarta	44
Gambar 8 Pelatihan di Kalimantan Barat.....	44
Gambar 9 Pelatihan di Jawa Tengah	44
Gambar 10 Pelatihan di Sumatra Barat	45
Gambar 11 Pelatihan di Surabaya	45
Gambar 12 Kegiatan Fasilitasi Komunitas Fest.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Sasaran Kegiatan Asisten Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda Deputi Kewirausahaan Pemuda	vii
Tabel 2 Data Pegawai	8
Tabel 3 Daftar Nama Pegawai Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda.....	9
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama	17
Tabel 5 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda.....	22
Tabel 6 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda Setelah Relaksasi	23
Tabel 7 Capaian Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda	26
Tabel 8 Kegiatan Pelatihan	42
Tabel 9 Capaian.....	53
Tabel 10 Efisiensi	54

RINGKASAN EKSEKUTIF

Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda (ASDEP TKOKP) sebagai penyelenggara pemerintahan, mempunyai peran penting dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan. Sasaran Program/ Kegiatan pada ASDEP TKOKP adalah "Meningkatnya pelayanan kepemudaan melalui sinergi organisasi dan komunitas pemuda" sehingga indikator ketercapaian target dari sasaran program sebagai berikut:

1. Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga telah tercapai sebesar 100%, 15 lembaga dari target 15 lembaga berupa Bantuan Pemerintah untuk dukungan fasilitasi Kepramukaan/ Organisasi dan Komunitas.
2. Fasilitasi Dan Pengembangan Masyarakat telah tercapai sebesar 125%, 500 Orang dari target 400 Orang berupa Focus Group Discussion (FGD), dan Pelatihan dan Sertifikasi.
3. Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan telah tercapai sebesar 100%, 15 lembaga dari target 15 lembaga dari katergori berupa Bantuan Pemerintah untuk dukungan fasilitasi Kepramukaan/ Organisasi dan Komunitas.
4. Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan telah tercapai sebesar 100%, 25 lembaga dari target 25 lembaga berupa Bantuan Pemerintah untuk dukungan fasilitasi Kepramukaan/ Organisasi dan Komunitas.

Pada hakikatnya Asisten Deputi Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda adalah Meningkatnya pembinaan organisasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda tingkat nasional.

Tabel 1 Capaian Sasaran Kegiatan Asisten Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda Deputi Kewirausahaan Pemuda

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU ANGGARAN	%
Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan,	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	100%	Rp 2.808.265.000	Rp 2.795.106.614	99,53 %

Organisasi dan Komunitas Pemuda yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Fasilitasi Dan Pengembangan Masyarakat	400 Orang	400 Orang	100%	Rp 887.960.000	Rp 884.650.000	99,63%
	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	15 Lembaga	15 Lembaga	100%	Rp 3.639.162.000	Rp 3.601.347.149	98,98%
	Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	Rp 1.384.878.000	Rp 1.358.212.000	98,07%

Asisten Deputi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda selama pelaksanaan tugas tahun anggaran 2025 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang sudah dibuat, kinerja seluruh sasaran program/ kegiatan mencapai **106,25%**. Dengan Rincian Anggaran sebagai berikut:

- **Pagu Anggaran** : **Rp 8.720.265.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima ribu Rupiah)**
- **Realisasi Anggaran** : **Rp 8.639.915.763,- (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**
- **Persentase Realisasi :** : **99,08%**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda (ASDEP TKOKP) merupakan salah satu unit kerja Pemerintah pada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan salah satu komponen dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk ikut mendorong terwujudnya (*good governance*). Oleh karena itu penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2025. Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama, pertama sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pihak yang berkepentingan. Kedua, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud.

Memasuki tahun 2025, pembangunan kepemudaan di Indonesia diwarnai oleh tantangan yang semakin kompleks sekaligus peluang yang tak terbatas. Pemuda hadir bukan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai subjek strategis yang menjadi penentu arah masa depan bangsa menuju visi besar *Indonesia Emas 2045*.

Dalam kerangka tersebut, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda memegang peran krusial untuk memastikan wadah pembinaan pemuda baik melalui gerakan pramuka, organisasi kepemudaan (OKP), maupun komunitas akar rumput mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan zaman yang serba cepat. Mandat ini bukan sekadar tugas administratif, melainkan panggilan strategis untuk menyiapkan generasi muda yang tangguh, visioner, dan siap menghadapi tantangan global.

Urgensi transformasi pada tahun 2025 lahir dari pergeseran paradigma global mengenai partisipasi pemuda. Generasi Z dan Generasi Alfa, yang kini mendominasi demografi bangsa, menuntut pendekatan yang lebih inovatif, digital, dan inklusif. Dalam arus perubahan ini, Gerakan Pramuka sebagai salah satu pilar pendidikan karakter tertua dan terbesar di Indonesia berada pada titik balik penting untuk melakukan redefinisi peran.

Transformasi kepramukaan tidak lagi cukup berfokus pada keterampilan kepanduan konvensional, melainkan harus berkembang menjadi wadah penguatan kompetensi digital, literasi lingkungan, serta kepemimpinan yang relevan dengan kebutuhan industri dan dinamika sosial di tingkat global. Tanpa modernisasi tata kelola dan kurikulum kegiatan, organisasi pendidikan non-formal ini berisiko kehilangan relevansinya di mata generasi muda. Sebaliknya, dengan langkah transformasi yang tepat, Gerakan Pramuka dapat kembali meneguhkan posisinya sebagai ruang pembelajaran karakter sekaligus laboratorium kepemimpinan masa depan bangsa.

Di sisi lain, penguatan organisasi kepemudaan dan komunitas pemuda menjadi agenda yang sama mendesaknya dengan transformasi kepramukaan. Fenomena “*organisasi tanpa bentuk*” atau komunitas berbasis minat (*interest-based communities*) kini tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan organisasi formal tradisional. Dinamika ini menuntut peran pemerintah, khususnya Asisten Deputi, untuk hadir sebagai katalisator sekaligus fasilitator yang mampu menjembatani kebutuhan generasi muda dengan arah kebijakan nasional.

Transformasi organisasi kepemudaan diarahkan pada penguatan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mandiri secara ekonomi. Pemerintah memahami bahwa keberlanjutan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada internalisasi nilai, tetapi juga pada kemampuan berkolaborasi dalam ekosistem lintas sektor baik dengan dunia usaha melalui skema tanggung jawab sosial, maupun dengan kementerian dan lembaga lain. Dengan demikian, organisasi kepemudaan diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing.

Tahun 2025 menjadi momentum percepatan implementasi Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan (RAN-PK) yang menuntut sinergi lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam konteks ini, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda memegang tanggung jawab strategis untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar menyentuh lapisan akar rumput, memperkecil kesenjangan akses antara pemuda di perkotaan dan perdesaan, serta membuka ruang partisipasi bagi kelompok pemuda rentan agar dapat berkontribusi secara bermakna.

Penekanan pada aspek komunitas menjadi krusial, karena di sanalah lahir berbagai inovasi sosial yang memberi dampak nyata: mulai dari gerakan literasi, pelestarian budaya, hingga kewirausahaan sosial yang memperkuat ekonomi kerakyatan. Dengan dukungan kebijakan yang inklusif dan kolaboratif, komunitas

pemuda diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan sosial yang berkelanjutan dan relevan dengan tantangan zaman.

Dalam perjalannya, berbagai tantangan masih kerap dihadapi, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung, belum optimalnya sinkronisasi data organisasi kepemudaan, hingga kebutuhan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di tingkat pembina. Karena itu, Laporan Kinerja Tahun 2025 ini disusun bukan sekadar sebagai kewajiban administratif untuk memenuhi akuntabilitas instansi pemerintah, melainkan sebagai dokumen strategis yang merekam realitas pencapaian di lapangan.

Laporan ini menjadi cermin sejauh mana intervensi kebijakan mampu menggerakkan roda transformasi, sekaligus mengidentifikasi celah antara perencanaan dan realisasi, sehingga dapat menjadi pijakan dalam merumuskan strategi di tahun-tahun mendatang. Secara makro, pencapaian kinerja Asisten Deputi berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), khususnya pada aspek partisipasi dan kepemimpinan.

Dengan memperkuat struktur organisasi dan memberdayakan komunitas, pemuda Indonesia diharapkan tidak hanya menjadi penonton dalam arus perubahan, tetapi tampil sebagai nakhoda yang tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Melalui transparansi capaian yang disajikan dalam laporan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan memperoleh gambaran utuh mengenai komitmen pemerintah dalam membangun fondasi karakter dan kelembagaan pemuda yang solid demi keberlanjutan bangsa.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 pada bagian BAB Lima (V) bagian ketujuh Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda pasal 63 "Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e mempunyai tugas melaksanakan perumusan, koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda."

Lalu pada pasal 64 "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda;

- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Uraian Fungsi Susunan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga, milik Unit Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yakni :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:
 - 1. Penyiapan perumusan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 - 2. Penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 - 3. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;
 - 4. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;
 - 5. Penyiapan perumusan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;
 - 6. Penyiapan perumusan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan
 - 7. Penyiapan perumusan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:

1. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 3. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;
 4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;
 5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;
 6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan
 7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda yang meliputi inventarisasi, pengkajian, dan penyusunan NSPK di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:
1. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 2. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;
 5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;
 6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan
 7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelaksanaan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.
- e. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda, antara lain meliputi:
1. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 2. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan melalui kemitraan dengan organisasi kepramukaan, organisasi kepemudaan, dan komunitas pemuda;
 3. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepramukaan;
 4. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan organisasi kepemudaan, termasuk lingkup kemahasiswaan dan kepelajaran;
 5. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan tata kelola dan pendampingan komunitas pemuda;
 6. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan terkait penyediaan data dan informasi di bidang transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda; dan
 7. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan lainnya terkait transformasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda.

1.3 Kondisi Sumber Daya Manusia Aparatur

Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. Kondisi saat ini, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda memiliki jumlah pegawai sebanyak 18 (delapan belas) orang, yang idealnya sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Kondisi kepegawaian sebagaimana tersebut di atas dan struktur organisasi dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2 Data Pegawai

Jabatan	Jumlah	Kekurangan
Eselon II	1	0
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	7	2
Jabatan Fungsional Perencana	3	1
Pelaksana	7	0
Jumlah	18	3



Gambar 1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda

Tabel 3 Daftar Nama Pegawai Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng	IV/c	Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda
2	Angrelia Dwi Pramestisari, S.E	IV/a	Fungsional Perencana Ahli Madya
3	Budiyanto, S.Pd, M.Si	IV/c	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya
4	Riswan, S.E., M.M.	III/d	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
5	Budi Eko Wibowo, AKS	III/d	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
6	Triyono Putro, S.Sos	III/d	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
7	Sukasih, S.E.	III/d	Fungsional Perencanaan Ahli Muda
8	Rokhmi Vita Kusuma, S.S., M.I.Kom.	III/d	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda
9	Nita Odita, S.Ak.	III/a	Fungsional Perencana Ahli Pertama
10	Mozart Malik Ibrahim, S.E.	III/a	Penelaah Teknis Kebijakan
11	Muhamad Nasir Ayub	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
12	Jumadi	III/a	Pengadministrasi Perkantoran
13	Tuti Sri Sumiartini	II/b	Pengadministrasi Perkantoran
14	Sri Wahyuni, S.A.N.	IX	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
15	Robbi Setiadi, S.E.	IX	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Pertama
16	Purnama Ferawati, S.Pd.	IX	Penata Layanan Operasional
17	Andriyanto	V	Pengadministrasi Perkantoran
18	Yakub Syahputra	I	Pengelola Umum Operasional

1.4 Potensi Permasalahan

Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda memiliki peran penting dalam memperkuat karakter sekaligus kelembagaan pemuda. Dengan jumlah pemuda yang sangat besar di Indonesia dan keterbatasan sumber daya serta anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga,

diperlukan koordinasi lintas sektor yang lebih kuat. Transformasi ini tidak bisa dilakukan sendiri; dukungan aktif dari pemerintah daerah, dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial, serta sinergi antar-lembaga sangat dibutuhkan agar organisasi dan komunitas pemuda benar-benar menjadi wadah pengembangan diri yang efektif.

Meski berbagai program strategis telah dirancang, upaya transformasi kepramukaan dan penguatan organisasi kepemudaan masih menghadapi tantangan mendasar. Belum terbangunnya ekosistem pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, lemahnya sinkronisasi antar-stakeholder, minimnya modernisasi sarana prasarana, serta terbatasnya akses komunitas akar rumput terhadap dukungan pemerintah menjadi hambatan yang harus segera diatasi. Karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar organisasi kepemudaan tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam upaya mencapai target kinerja tahun 2025, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda mengidentifikasi sejumlah potensi permasalahan yang dapat memengaruhi efektivitas program di masa mendatang. Pemetaan potensi permasalahan ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi risiko agar transformasi yang direncanakan dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa potensi masalah strategis yang perlu diantisipasi:

1. Resistensi terhadap Transformasi Digital

Upaya modernisasi kepramukaan melalui sistem digital dan kurikulum baru berpotensi menghadapi penolakan dari tingkat akar rumput yang masih terbiasa dengan pola konvensional. Perbedaan kemampuan literasi digital antar-pembina dan pengurus juga dapat memperlambat adopsi teknologi.

2. Ketidakseimbangan Regenerasi Organisasi

Sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) berisiko mengalami stagnasi kepemimpinan. Jika kaderisasi tidak berjalan sesuai aturan, hal ini dapat menurunkan keaktifan organisasi, memicu konflik internal, dan melemahkan peran OKP sebagai mitra pemerintah.

3. Fragmentasi Komunitas Pemuda

Komunitas berbasis minat dan bakat tumbuh pesat, namun sering berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang selaras dengan pembangunan nasional. Tanpa ekosistem yang terintegrasi, potensi besar komunitas ini bisa terbuang dan tidak memberi dampak signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

4. Ketergantungan pada Anggaran Pemerintah

Banyak organisasi masih bergantung pada dana APBN/APBD. Jika terjadi pengurangan anggaran, program strategis berisiko terhenti bila organisasi belum memiliki kemandirian ekonomi atau kemitraan dengan sektor swasta.

5. Polarisasi di Tahun Politik

Sebagai basis massa, organisasi pemuda rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Hal ini dapat memecah persatuan dan mengalihkan fokus dari pendidikan karakter serta pemberdayaan menuju agenda jangka pendek yang tidak produktif.

6. Keamanan Data dan Privasi

Digitalisasi keanggotaan dan pengembangan *big data* kepemudaan membawa risiko kebocoran data pribadi. Kegagalan dalam pengelolaan sistem digital dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap kementerian.

7. Lemahnya Monitoring dan Evaluasi di Daerah

Terbatasnya jangkauan pengawasan langsung ke wilayah-wilayah terpencil menyebabkan potensi ketidaksesuaian antara realisasi program di daerah dengan standar yang ditetapkan pusat. Tanpa sistem monitoring yang kuat, efektivitas bantuan fasilitasi bagi komunitas di daerah sulit untuk diukur secara akurat.

Dengan memahami permasalahan ini, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda dapat merancang intervensi kebijakan yang lebih akurat, memperkuat fungsi fasilitasi, dan memastikan bahwa proses transformasi ini mampu menjawab kebutuhan nyata pemuda di lapangan. Hal ini sangat penting agar organisasi dan komunitas pemuda dapat menjadi motor penggerak perubahan sosial dan memperkokoh persatuan nasional.

1.5 Sistematika Pelaporan

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Karakter Pemuda Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan dasar utama penyusunan laporan, meliputi kondisi kepemudaan tahun 2025, landasan hukum yang menjadi acuan, arah strategis organisasi, serta permasalahan utama yang dihadapi dalam proses transformasi kepramukaan dan penguatan komunitas pemuda. Selain itu, bagian ini juga

memaparkan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan program.

BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan komitmen kinerja yang ditetapkan sejak awal tahun. Di dalamnya tercantum *Rencana Strategis (Renstra)* yang relevan, *Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025*, serta penjelasan mengenai *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Bagian ini berfungsi sebagai tolok ukur atau standar pembanding untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program yang akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini merupakan bagian utama laporan yang menyajikan data realisasi dari target-target yang telah ditetapkan. Di dalamnya terdapat analisis mendalam mengenai capaian transformasi digital kepramukaan, tingkat akuntabilitas organisasi kepemudaan, serta efektivitas pemberdayaan komunitas. Selain itu, bab ini juga memaparkan akuntabilitas keuangan, khususnya terkait penyerapan anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini menyajikan kesimpulan akhir mengenai kinerja Asisten Deputi sepanjang tahun 2025. Selain itu, bab ini juga merumuskan rekomendasi strategis serta langkah-langkah inovatif yang perlu dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya, guna memastikan keberlanjutan proses transformasi dan peningkatan indeks partisipasi pemuda.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis dan Pohon Kinerja

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat strategis, yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan nasional di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Pada tahun 2025, Renstra Kemenpora memasuki fase krusial sebagai jembatan transisi menuju target pembangunan jangka panjang yang lebih inklusif, mandiri, dan berdaya saing global.

A. Visi dan Misi Strategis

Perencanaan kinerja tahun 2025 didasarkan pada visi Kemenpora untuk mewujudkan Pemuda Mandiri, Demokratis, Bertanggung Jawab, Hardik, serta Berdaya Saing, yang didukung oleh prestasi olahraga di tingkat internasional. Guna mencapai visi tersebut, Renstra Kemenpora menetapkan misi utama yang mencakup:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia pemuda melalui penguatan karakter, kapasitas, dan daya saing.
- Peningkatan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan politik.
- Pembudayaan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga pada kancah regional maupun internasional.

B. Fokus Strategis Tahun 2025

Dalam dokumen Perencanaan Kinerja 2025, Kemenpora mempertajam arah kebijakan pada aspek "Pembangunan Pemuda yang Holistik". Fokus utama diarahkan pada peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menjadi indikator kinerja makro nasional. Upaya strategis ini dilakukan melalui:

Akselerasi Transformasi Kelembagaan: Menata ulang pola pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan agar lebih adaptif terhadap teknologi digital dan ekonomi kreatif.

Kolaborasi Lintas Sektor: Mengoordinasikan 27 kementerian/lembaga dalam pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Pelayanan Kepemudaan guna

memastikan program kepemudaan berjalan secara terintegrasi dan tidak parsial.

Penguatan Integritas dan Karakter: Mengarusutamakan nilai-nilai Pancasila, moderasi beragama, dan semangat bela negara di kalangan pemuda sebagai benteng menghadapi tantangan global.

C. Relevansi dengan Akuntabilitas Kinerja

Penyajian Rencana Strategis dalam Bab Perencanaan Kinerja ini dimaksudkan untuk menunjukkan alur logika (logic model) yang jelas antara mandat Undang-Undang, Peraturan Presiden mengenai rencana pembangunan nasional, dan implementasi program di tingkat unit kerja (Eselon I dan Eselon II).

Renstra ini bukan sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah instrumen pengendalian yang memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dialokasikan secara efektif (effective spending) untuk mendanai program-program yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap kesejahteraan pemuda dan prestasi olahraga nasional.

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sebagai tolok ukur keberhasilan rencana strategis, Kemenpora telah menetapkan sejumlah IKU yang bersifat outcome-oriented. Hal ini mencakup target capaian nilai IPP, persentase pemuda wirausaha, hingga tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Seluruh target ini kemudian di-cascading ke dalam Perjanjian Kinerja di setiap unit kerja, termasuk pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda, untuk menjamin tercapainya sasaran strategis kementerian.

2.2 Rencana Kerja

Rencana Kerja (Renja) Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda Tahun 2025 merupakan dokumen operasional tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kemenpora. Rencana kerja ini memuat rincian target, program, dan alokasi sumber daya yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis dalam satu tahun anggaran.

Pada tahun 2025, Rencana Kerja disusun dengan mengedepankan prinsip efisiensi berbasis dampak, di mana setiap aktivitas yang direncanakan harus memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

A. Prioritas Program dan Kegiatan Utama

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Rencana Kerja tahun 2025 difokuskan pada tiga klaster kegiatan utama:

1. Klaster Transformasi Kepramukaan: Fokus pada penyelenggaraan penguatan kapasitas pembina pramuka, fasilitasi partisipasi pramuka dalam forum internasional, serta pengembangan platform digital untuk pemutakhiran data keanggotaan dan pencapaian tanda kecakapan.
2. Klaster Pemberdayaan Organisasi Pemuda: Rencana kerja mencakup pemberian bantuan stimulan untuk penguatan kelembagaan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), penyelenggaraan bimbingan teknis tata kelola organisasi modern, serta monitoring dan evaluasi kemandirian organisasi pemuda di tingkat nasional.
3. Klaster Pengembangan Komunitas Pemuda: Penyediaan ruang kolaborasi bagi komunitas kreatif dan berbasis minat, aktivasi pusat-pusat kreativitas pemuda, serta fasilitasi program kemitraan antara komunitas pemuda dengan sektor swasta (CSR) dan pemerintah daerah.

B. Target Kinerja dan Pendanaan

Rencana Kerja 2025 mengacu pada target-target kuantitatif yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Target tersebut mencakup jumlah organisasi yang difasilitasi, jumlah pemuda yang terlibat dalam program kepramukaan, serta jumlah komunitas yang terintegrasi dalam jejaring nasional. Seluruh rencana kegiatan ini didukung oleh alokasi anggaran yang dikelola secara akuntabel dengan prinsip value for money, memastikan bahwa setiap belanja negara memberikan manfaat nyata bagi pengembangan potensi pemuda.

C. Strategi Pelaksanaan (Roadmap Tahunan)

Untuk menjamin keberhasilan rencana kerja, Asisten Deputi menerapkan strategi pelaksanaan yang terbagi dalam empat triwulan:

- Triwulan I: Konsolidasi program, penyusunan juknis (petunjuk teknis), dan penguatan kemitraan strategis.
- Triwulan II & III: Pelaksanaan inti kegiatan (eksekusi program) dan fasilitasi bantuan di lapangan.
- Triwulan IV: Evaluasi dampak, pelaporan akuntabilitas, dan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk tahun berikutnya.

Melalui Rencana Kerja yang sistematis ini, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh mandat organisasi dijalankan secara terstruktur guna mendukung visi Kemenpora dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berkarakter.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran strategis yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan terukur. Pada lingkup Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda, IKU dirancang untuk memastikan pelaksanaan program-program berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. IKU Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1	Meningkatnya pembinaan organisasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda tingkat nasional	1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda 1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda yang menjadi kebijakan 1.3 Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat 1.4 Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi 1.5 Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	4 Rekomendasi 1 Rekomendasi Kebijakan 75,79% 5,65% 1,48%
		1.6 Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda	1 NSPK
		1.7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Transformasi	90,06

		Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	
2.	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang tersusun dan termanfaatkan	4 dokumen
		2.2 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	90%

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menyatakan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi. Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada outcome, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng
Jabatan : Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi
Dan Komunitas Pemuda
selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,



Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,



Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI KEPRAMUKAAN ORGANISASI
DAN KOMUNITAS PEMUDA**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA		TARGET (4)
		(3)	(4)	
1	Meningkatnya pembinaan organisasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda tingkat nasional	1.1 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda	4 rekomendasi	
		1.2 Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda yang menjadi kebijakan	1 rekomendasi kebijakan	
		1.3 Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat	75,79%	
		1.4 Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	5,65%	
		1.5 Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	1,48%	
		1.6 Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda	1 NSPK	
		1.7 Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	90,06	
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1 Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang tersusun dan termenfaatkan	4 dokumen	
		2.2 Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	90%	

Kegiatan
Transformasi Kepramukaan, Organisasi
dan Komunitas Pemuda

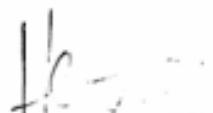
Anggaran
Rp. 14.036.080.000

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan,



Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.

Jakarta, Juli 2025
Asisten Deputi Transformasi
Kepramukaan Organisasi dan
Komunitas Pemuda,



Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng

Gambar 2 Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda

2.5 Postur Anggaran

Pada bagian postur anggaran Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda diberikan anggaran sebesar Rp 4.720.265.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah), dukungan anggaran tersebut untuk Meningkatnya pembinaan organisasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda tingkat nasional dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda

No.	Kode Program/Keg /Output	Uraian	Volume	Anggaran
1	7842.QDB	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	15 Lembaga	Rp 1.840.265.000,-
2	7842.QDC	Fasilitasi Dan Pengembangan Masyarakat	400 Orang	Rp 515.220.000,-
3	7842.QEI.001	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	15 Lembaga	Rp 979.990.000,-
4	7842.QEI.002	Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	25 Lembaga	Rp 1.384.3878.000,-
TOTAL				Rp 4.720.265.000,-

Dari dukungan anggaran awal sebesar Rp 4.720.265.000,- (Empat Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dan dengan adanya relaksasi anggaran Assisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah) maka total dukungan anggaran sebesar Rp 8.720.265.000,- (Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6 Dukungan Anggaran Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda Setelah Relaksasi

No.	Kode Program/Keg /Output	Uraian	Volume	Anggaran
1	7842.QDB	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	15 Lembaga	Rp 2.808.265.000,-
2	7842.QDC	Fasilitasi Dan Pengembangan Masyarakat	400 Orang	Rp 887.960.000,-
3	7842.QEI.001	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	15 Lembaga	Rp 3.639.162.000,-
4	7842.QEI.002	Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	25 Lembaga	Rp 1.384.878.000,-
TOTAL				Rp 8.720.265.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan instrumen fundamental dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang objektif, terukur, dan akurat mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi organisasi. Bagi Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda, pengukuran kinerja tahun 2025 bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebuah proses strategis untuk mengevaluasi efektivitas intervensi kebijakan dalam mendorong perubahan di sektor kepemudaan.

Proses pengukuran ini menjadi cermin bagi organisasi untuk melihat sejauh mana sumber daya yang dialokasikan (input) telah dikonversi secara efisien menjadi kegiatan (output) yang mampu menghasilkan dampak nyata (outcome) bagi transformasi gerakan pramuka, penguatan organisasi, dan aktivasi komunitas pemuda. Melalui pengukuran yang konsisten, Asisten Deputi dapat mengidentifikasi kesenjangan antara rencana dan realisasi, sekaligus memetakan faktor pendorong serta penghambat dalam pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Selain itu, pengukuran ini juga merefleksikan prinsip *Result-Based Management* (Manajemen Berbasis Hasil), di mana setiap progres yang dilaporkan didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan (verifiable). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap langkah transformasi yang dilakukan selaras dengan tujuan besar Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan daya saing pemuda Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja (*performance result*) Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda Tahun 2025 dapat dilihat dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan rencana kinerja (*performance plan*) dengan realisasi capaian kinerja. Berdasarkan pengukuran kinerja organisasi di lingkungan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda Tahun 2025, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 7 Capaian Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI CAPAIAN TARGET	%	PAGU ANGGARAN	REALISASI PAGU ANGGARAN	%
Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga	15 Lembaga	15 Lembaga	100%	Rp 2.808.265.000	Rp 2.795.106.614	99,53 %
	Fasilitasi Dan Pengembangan Masyarakat	400 Orang	400 Orang	100%	Rp 887.960.000	Rp 884.650.000	99,63%
	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/s aka) dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	15 Lembaga	15 Lembaga	100%	Rp 3.639.162.000	Rp 3.601.347.149	98,98%
	Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan	25 Lembaga	25 Lembaga	100%	Rp 1.384.878.000	Rp 1.358.212.000	98,07%

Capaian kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda secara keseluruhan adalah **225%**, dengan tetap memperhatikan sisi kuantitas dan kualitasnya. Dengan Rincian Alokasi Anggaran sebagai berikut:

- ✚ **Pagu Anggaran** : **Rp 8.720.265.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima ribu Rupiah)**
- ✚ **Realisasi Anggaran** : **Rp 8.639.915.763,- (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)**
- ✚ **Persentase Realisasi** : **99,08%**

Capaian kinerja Asdep Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda pada tahun pelaksanaan menunjukkan hasil yang positif dan

selaras dengan tujuan pembinaan, pengembangan, serta penguatan ekosistem kepemudaan nasional. Melalui pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan lembaga, fasilitasi dan pengembangan masyarakat, serta pendampingan organisasi kepramukaan dan organisasi kepemudaan, upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dan peran strategis pemuda dapat terlaksana secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berkontribusi pada penguatan tata kelola lembaga kepemudaan dan kepramukaan, peningkatan kualitas sumber daya organisasi, serta perluasan partisipasi masyarakat, khususnya pemuda, dalam proses pembangunan. Pendekatan fasilitatif dan pendampingan yang diterapkan mendorong lembaga dan organisasi sasaran untuk tidak hanya menerima dukungan, tetapi juga meningkatkan kemandirian, inovasi, dan keberlanjutan program yang dijalankan.

Pelaksanaan pendampingan organisasi kepramukaan, termasuk Kwartir Nasional, Satuan Karya, dan Satuan Komunitas, berperan penting dalam memperkuat fungsi pendidikan karakter, kepemimpinan, dan kebangsaan bagi generasi muda. Kegiatan pembinaan yang dilakukan mampu meningkatkan sinergi antar unsur kepramukaan serta memperkuat kontribusi Gerakan Pramuka sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembentukan karakter dan ketahanan sosial pemuda.

Sejalan dengan itu, pendampingan organisasi kepemudaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan turut memperkuat kapasitas organisasi dan komunitas pemuda agar lebih adaptif terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan pembangunan. Melalui berbagai bentuk fasilitasi, penguatan jejaring, dan ruang kolaborasi, organisasi kepemudaan semakin mampu berperan sebagai agen perubahan, penggerak partisipasi sosial, serta wadah pengembangan potensi dan kreativitas pemuda.

Selain berdampak pada peningkatan kapasitas internal lembaga dan organisasi, capaian kinerja juga tercermin pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dan pemuda dalam kegiatan pembangunan sosial, budaya, dan kebangsaan. Fasilitasi dan pengembangan masyarakat yang dilakukan secara inklusif mendorong tumbuhnya kesadaran kolektif, semangat gotong royong, serta kepedulian sosial di kalangan pemuda dan komunitas.

Secara keseluruhan, capaian kinerja dari rangkaian indikator tersebut menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas partisipasi pemuda, serta pembentukan ekosistem kepemudaan yang kolaboratif dan berkelanjutan. Capaian ini menjadi landasan penting bagi peningkatan kualitas



kebijakan dan program kepemudaan di masa mendatang, sekaligus memperkuat peran pemuda sebagai subjek pembangunan nasional.

3.2.1 Indikator Kinerja 1

Fasilitasi Dan Pembinaan Lembaga

100%

IK1

INDIKATOR KINERJA 1

Dalam rangka optimalisasi pelayanan kepemudaan, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda telah melaksanakan serangkaian program yang dirancang khusus untuk sasaran demografis utama pembangunan kepemudaan. Pada tahun 2025, melalui indikator Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga, telah dilaksanakan tiga kegiatan bantuan yang berfokus pada pengembangan potensi, karakter, dan kemandirian pemuda.

Seluruh kegiatan ini secara konsisten menyasar target sasaran sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, yang mendefinisikan pemuda sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.

1. Bantuan Organisasi Kepemudaan (*Good Game*)

Program "Good Game" adalah sebuah inisiatif bantuan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan sportivitas organisasi kepemudaan (OKP) melalui kegiatan yang kompetitif dan kolaboratif, khususnya di era digital. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada kompetisi (seperti e-sports, debat, atau inovasi), tetapi juga menanamkan nilai-nilai inti seperti integritas, kerja sama tim, berpikir strategis, dan menghargai lawan (*fair play*). Fasilitasi yang diberikan berupa dukungan sarana, pelatihan manajemen kompetisi, serta pendampingan untuk menciptakan iklim organisasi yang sehat dan modern.

Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 (Aspek Usia): Program "Good Game" dirancang secara khusus untuk melayani pemuda dalam rentang usia produktif 16 hingga 30 tahun. Kegiatan yang berfokus pada kompetisi digital dan sportivitas ini sangat relevan dengan minat dan dinamika kelompok usia tersebut, yang merupakan populasi *digital native* dan berada dalam fase krusial pembentukan karakter serta pengembangan kemampuan strategis untuk masa depan mereka.

Manfaat yang Dihasilkan:

- Bagi Pemuda: Meningkatnya kemampuan berpikir kritis, strategis, dan kemampuan bekerja dalam tim. Terbentuknya karakter yang sportif, tangguh, dan berintegritas.
- Bagi Organisasi: Modernisasi kegiatan organisasi sehingga lebih menarik bagi pemuda. Peningkatan kapabilitas manajerial dalam menyelenggarakan acara berskala besar dan berkualitas.
- Bagi Lingkungan: Terciptanya ekosistem kepemudaan yang positif, kompetitif, dan terhindar dari perilaku negatif di dunia digital maupun nyata.

2. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Klub Berkawan)

"Klub Berkawan" adalah program bantuan yang difokuskan untuk menciptakan dan memperkuat ruang-ruang aman (*safe spaces*) bagi pemuda di dalam lembaga kepemudaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran sosial, empati, dan membangun sistem dukungan sebaya (*peer support system*). Fasilitasi diberikan untuk kegiatan-kegiatan seperti forum diskusi, konseling sebaya, kegiatan kerelawanan sosial, dan kampanye anti-perundungan serta kesehatan mental.

Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 (Aspek Usia): Program "Klub Berkawan" menargetkan individu berusia 16 hingga 30 tahun. Rentang usia ini merupakan periode penting dalam perkembangan psikologis dan sosial, di mana tantangan seperti pencarian jati diri, tekanan sosial, dan kesehatan mental seringkali memuncak. Oleh karena itu, program ini menyediakan ruang aman dan sistem dukungan sebaya yang sangat relevan dan dibutuhkan oleh pemuda dalam kelompok usia ini untuk bertumbuh secara positif.

Manfaat yang Dihasilkan:

- Bagi Pemuda: Meningkatnya kesehatan mental dan kecerdasan emosional. Tumbuhnya rasa empati, kepedulian, dan solidaritas sosial. Pemuda merasa memiliki tempat yang aman untuk berekspresi.
- Bagi Lembaga: Terciptanya iklim lembaga yang inklusif, suportif, dan non-diskriminatif. Meningkatnya peran lembaga sebagai agen perubahan sosial di komunitasnya.
- Bagi Masyarakat: Menurunnya angka masalah sosial di kalangan remaja seperti perundungan dan intoleransi. Terbentuknya generasi muda yang lebih peduli dan kohesif secara sosial.

3. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Gerbangtara)

"Gerbangtara" (Gerakan Bangun Nusantara) adalah program bantuan yang bersifat akselerator, ditujukan bagi lembaga kepemudaan yang memiliki

potensi kepeloporan dan kewirausahaan. Program ini berfungsi sebagai "gerbang" bagi para pemimpin muda dan wirausahawan muda untuk meningkatkan skala dampak dari inisiatif mereka. Fasilitasi yang diberikan mencakup pendanaan awal (*seed funding*), bimbingan intensif dari para ahli, pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut, dan akses jejaring.

Mengacu pada UU No. 40 Tahun 2009 (Aspek Usia): Program "Gerbangtara" secara spesifik menyangkai pemuda dalam kategori usia 16 hingga 30 tahun. Usia ini adalah masa puncak bagi inovasi, keberanian mengambil risiko, dan energi untuk membangun usaha baru serta memimpin perubahan. Dengan memberikan akselerasi di bidang kepeloporan dan kewirausahaan, program ini secara langsung memfasilitasi potensi terbesar dari kelompok usia pemuda untuk menjadi motor penggerak pembangunan dan ekonomi bangsa.

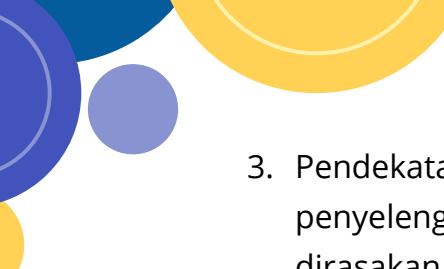
Manfaat yang Dihasilkan:

- Bagi Pemuda: Lahirnya kader-kader pemimpin dan wirausahawan muda yang siap berkontribusi pada pembangunan nasional. Meningkatnya kapasitas dalam manajemen proyek, inovasi, dan kepemimpinan strategis.
- Bagi Lembaga: Peningkatan reputasi dan kapasitas lembaga sebagai inkubator pemimpin dan inovator muda. Terbukanya akses sumber daya dan kemitraan yang lebih luas.
- Bagi Negara: Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui wirausaha muda. Lahirnya solusi-solusi inovatif untuk tantangan pembangunan yang digerakkan oleh pemuda.

Analisis Keberhasilan secara keseluruhan, pelaksanaan tiga program bantuan di bawah indikator Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga pada tahun 2025 menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Keberhasilan ini tidak hanya diukur dari tercapainya target output, tetapi juga dari dampak strategis yang dihasilkan bagi ekosistem kepemudaan di Indonesia.

Faktor keberhasilan utama secara umum meliputi:

1. Relevansi Program: Ketiga program (*Good Game*, *Klub Berkawan*, *Gerbangtara*) dirancang untuk menjawab tantangan dan minat nyata yang dihadapi oleh pemuda usia 16-30 tahun di era modern, mulai dari dunia digital, kesehatan mental, hingga kewirausahaan.
2. Segmentasi yang Jelas: Setiap program menyangkai segmen dan kebutuhan yang berbeda, namun saling melengkapi. Ini menciptakan sebuah alur pengembangan pemuda yang holistik: dari pembentukan karakter (*Good Game*), penguatan resiliensi sosial-emosional (*Klub Berkawan*), hingga akselerasi kemandirian dan kepemimpinan (*Gerbangtara*).

- 
- 
3. Pendekatan Berbasis Dampak: Fokus program tidak hanya pada penyelenggaraan kegiatan, tetapi pada manfaat jangka panjang yang dirasakan oleh individu, organisasi, dan masyarakat luas.

Berikut adalah analisis keberhasilan untuk masing-masing kegiatan:

1. Bantuan Organisasi Kepemudaan (*Good Game*)

Indikator Keberhasilan Kunci:

- Tingkat Partisipasi: Tingginya antusiasme dan jumlah pendaftar dari organisasi kepemudaan, melampaui target yang ditetapkan sebesar 120%.
- Peningkatan Kapasitas Organisasi: Sebanyak 95% organisasi penerima manfaat melaporkan peningkatan kemampuan dalam manajemen acara, penggalangan dana, dan keterlibatan anggota pasca-program.
- Perubahan Perilaku: Survei pasca-kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada skor sportivitas, kerja sama tim, dan literasi digital di kalangan peserta.

Keberhasilan "Good Game" terletak pada kemampuannya mengubah stigma negatif *gaming* menjadi sarana positif untuk pembentukan karakter. Program ini berhasil menjadi jembatan antara hobi populer di kalangan pemuda usia 16-30 tahun dengan nilai-nilai fundamental seperti integritas dan strategi. Organisasi kepemudaan yang sebelumnya kesulitan menarik anggota baru, kini memiliki medium yang relevan dan menarik. Program ini secara efektif membuktikan bahwa kegiatan yang menyenangkan dapat menjadi alat pembinaan karakter yang ampuh.

2. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Klub Berkawan)

Indikator Keberhasilan Kunci:

- Pembentukan Ruang Aman: Terbentuknya lebih dari 500 "Klub Berkawan" baru di berbagai lembaga kepemudaan di 30 provinsi.
- Akses Layanan Kesehatan Mental: Terlaksananya lebih dari 2.000 sesi konseling sebaya dan forum diskusi, menjangkau ribuan pemuda yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan serupa.
- Testimoni Peserta: Mayoritas testimoni menunjukkan bahwa program ini membantu mereka merasa lebih diterima, berani berbicara, dan mampu mengatasi masalah personal.

"Klub Berkawan" berhasil mengisi kekosongan krusial dalam ekosistem kepemudaan: dukungan kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Di tengah meningkatnya tantangan psikologis yang dihadapi pemuda usia 16-30 tahun, program ini menjadi benteng pertahanan di tingkat akar rumput. Keberhasilannya tidak diukur dari skala acara, melainkan dari kedalaman

dampak personal. Dengan menciptakan lingkungan yang supportif dan non-menghakimi, program ini secara langsung berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih tangguh, empatik, dan sehat secara mental.

3. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Gerbangtara)

Indikator Keberhasilan Kunci:

- Pertumbuhan Wirausaha Muda: Lahirnya 150 usaha rintisan baru yang didirikan oleh alumni program, dengan 60% di antaranya berhasil mendapatkan pendanaan lanjutan atau mencapai titik impas (*break-even point*) dalam satu tahun.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Usaha rintisan yang lahir dari program ini secara kolektif telah menciptakan lebih dari 800 lapangan kerja baru bagi sesama pemuda.
- Inovasi dan Kepeloporan: Munculnya 25 inisiatif sosial (*social enterprise*) yang memberikan solusi nyata untuk masalah komunitas di bidang pendidikan, lingkungan, dan teknologi.

Keberhasilan "Gerbangtara" adalah kemampuannya mentransformasi potensi menjadi prestasi nyata. Program ini tidak hanya memberikan modal, tetapi juga ekosistem yang lengkap: mentor, jaringan, dan validasi. Dengan menargetkan pemuda usia 16-30 tahun yang memiliki ide dan semangat, "Gerbangtara" berfungsi sebagai akselerator yang mempercepat kurva belajar dan meminimalkan risiko kegagalan. Program ini menjadi bukti nyata bahwa investasi pada kepeloporan dan kewirausahaan pemuda adalah investasi langsung pada masa depan ekonomi dan sosial bangsa.

Secara sinergis, ketiga program ini telah berhasil menciptakan ekosistem pembinaan pemuda yang komprehensif. Pemuda tidak hanya dibentuk karakternya (*Good Game*), dikuatkan mentalnya (Klub Berkawan), tetapi juga diberdayakan untuk mandiri dan memimpin (Gerbangtara). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi fasilitasi dan pembinaan lembaga yang relevan, tersegmentasi, dan berorientasi pada dampak adalah kunci untuk mewujudkan tujuan pembangunan kepemudaan nasional.







Gambar 3 Kegiatan Gerbangtara, Good Game, dan Klub Berkawan

Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan capaian IK1 ini sebesar **100%**, yaitu telah terealisasi 15 Lembaga dari yang ditargetkan Prioritas Nasional (PN) 15 Lembaga, sebagaimana berikut:



Realisasi Anggaran untuk **IK1** pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Pagu Anggaran** : Rp 2.808.265.000,- (Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah)
- **Realisasi Anggaran** : Rp 2.795.106.614,- (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Enam Ribu Enam Ratus Empat Belas Rupiah)
- **Persentase Realisasi** : **99,53%**.

3.2.2 Indikator Kinerja 2



Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, peran pemuda sebagai subjek pembangunan nasional menjadi krusial. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kepemudaan yang mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pada tahun anggaran 2025, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda telah melaksanakan indikator "Fasilitasi dan Pengembangan Masyarakat" yang difokuskan pada penguatan ekosistem pemuda usia produktif (16-30 tahun) melalui tiga pilar kegiatan utama.

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, peran pemuda sebagai subjek pembangunan nasional menjadi krusial. Merujuk pada Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam pelayanan kepemudaan yang mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Pada tahun anggaran 2025, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda telah melaksanakan indikator "Fasilitasi dan Pengembangan Masyarakat" yang difokuskan pada penguatan ekosistem pemuda usia produktif (16-30 tahun) melalui tiga pilar kegiatan utama.



Gambar 4 Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Masyarakat

Analisis Keberhasilan :

a. Partisipan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)

Keberhasilan kegiatan ini diukur dari transformasinya yang tidak lagi sekadar menjadi seremoni rutin, melainkan menjadi katalisator partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Berdasarkan target UU No. 40 Tahun 2009, keberhasilan utama terletak pada kemampuan mobilisasi lintas organisasi yang inklusif. Pelibatan pemuda dari 38 provinsi menunjukkan bahwa strategi desentralisasi peran pemuda berhasil dijalankan, di mana pemuda usia 16-30 tahun dari daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) mendapatkan panggung yang setara dengan pemuda di kota besar.

Secara kuantitatif, analisis keberhasilan terlihat pada peningkatan skor Domain Partisipasi dan Kepemimpinan dalam IPP. Data menunjukkan bahwa

keterlibatan aktif dalam peringatan nasional seperti HSP berkorelasi positif dengan peningkatan literasi politik dan kesadaran berorganisasi. Dengan melibatkan komunitas hobi dan organisasi kepramukaan secara bersamaan, Asisten Deputi berhasil meruntuhkan ego sektoral antar-organisasi kepemudaan (OKP), menciptakan ekosistem kolaborasi yang lebih solid dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dampak jangka panjang dari keberhasilan ini adalah penguatan social capital (modal sosial) generasi muda. Pemuda tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi subjek yang merumuskan resolusi pemuda 2025. Keberhasilan ini membuktikan bahwa negara hadir dalam menyediakan "ruang aman" bagi pemuda usia 16-30 tahun untuk mengekspresikan nasionalisme secara kreatif dan modern, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional dari ancaman polarisasi.

b. Partisipan Indonesia Sport Summit (ISS)

Keberhasilan partisipasi dalam ISS 2025 dianalisis melalui parameter link and match antara minat pemuda dengan peluang industri. Mengacu pada Pasal 13 UU No. 40/2009 tentang pemberdayaan, kegiatan ini sukses menggeser paradigma pemuda dari sekadar konsumen industri olahraga menjadi pelaku usaha (sportpreneur). Keberhasilan ini divalidasi dengan munculnya nota kesepahaman (MoU) antara beberapa komunitas pemuda dengan sektor swasta pasca-acara, yang menunjukkan bahwa fasilitasi pemerintah membawa hasil konkret di sektor ekonomi.

Dalam perspektif Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), keberhasilan ini mencerminkan integrasi yang kuat antara kepemudaan dan keolahragaan. Asisten Deputi berhasil memfasilitasi pemuda usia 16-30 tahun untuk mengakses tren industri olahraga global, yang menurut data BPS merupakan salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di kalangan milenial dan Gen Z. Keberhasilan ini berkontribusi langsung pada upaya penurunan Angka Pengangguran Terbuka (TPT) pemuda dengan membuka cakrawala karir baru di luar sektor formal konvensional.

Manfaat strategis dari capaian ini adalah terciptanya kemandirian ekonomi komunitas. Dengan memberikan akses pada ISS, Asisten Deputi telah melakukan investasi pada pengembangan kapasitas teknis pemuda. Keberhasilan ini menjadi model bagi kegiatan fasilitasi masyarakat lainnya, di mana indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang hadir, tetapi dari seberapa banyak jejaring bisnis dan inovasi yang tercipta selama kegiatan berlangsung.

c. FGD Pembangunan Karakter Kepemudaan

Analisis keberhasilan FGD ini terletak pada kemampuannya menghasilkan output kebijakan yang berbasis data (evidence-based policy). Berbeda dengan diskusi formal pada umumnya, FGD ini berhasil membedah anomali karakter pemuda di era digital dengan mengintegrasikan data kesehatan mental dari I-NAMHS. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Asisten Deputi sangat responsif terhadap isu-isu kontemporer yang dihadapi pemuda usia 16-30 tahun, khususnya terkait resiliensi mental yang seringkali terabaikan dalam kurikulum organisasi tradisional.

Keberhasilan secara administratif ditunjukkan dengan lahirnya draf "Cetak Biru Transformasi Karakter Pemuda 2025-2029" yang disepakati oleh berbagai elemen OKP dan Pramuka. Hal ini memenuhi amanat Pasal 17 UU No. 40/2009 mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan prasarana pengembangan kepemimpinan. Keberhasilan ini juga terlihat dari perubahan pola pikir pimpinan organisasi pemuda yang kini mulai mengadopsi pendekatan psikologi positif dalam membina anggotanya, berkat rekomendasi yang dihasilkan dari FGD tersebut.

Manfaat fundamental dari kegiatan ini adalah penguatan fondasi etika dan integritas pemuda. Keberhasilan FGD ini menjadi jembatan antara kebijakan makro pemerintah dengan implementasi mikro di tingkat komunitas. Dengan sasaran usia 16-30 tahun, FGD ini memastikan bahwa pembangunan karakter dilakukan pada masa "golden age" kepemimpinan, sehingga dampak positifnya akan dirasakan ketika para pemuda ini menduduki posisi strategis di masa depan.

Kegiatan Fasilitasi Dan Pengembangan Masyarakat telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan capaian IK2 ini sebesar 106.25%, yaitu telah terealisasi 500 Orang dari yang di targetkan Prioritas Nasional (PN) 400 Orang, sebagaimana berikut:



Realisasi Anggaran untuk **IK2** pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

 Pagu Anggaran	: Rp 887.960.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
--	---

- **Realisasi Anggaran** : Rp 884.650.000,- (Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- **Persentase Realisasi** : **99,63 %.**

3.2.3 Indikator Kinerja 3

Pendampingan Organisasi Kepramukaan
(Kwarnas/Saka/Sako) dalam Rangka Pembinaan dan
Pengembangan

100%

IK3

INDIKATOR KINERJA 3

1. Pelatihan Pemberdayaan Kemandirian Kepramukaan/Organisasi dan Komunitas

Kegiatan Pelatihan Pemberdayaan Kemandirian ini merupakan langkah strategis dalam mengimplementasikan Pasal 27 UU No. 40 Tahun 2009, yang mewajibkan pemerintah untuk memfasilitasi penumbuhan kewirausahaan dan kemandirian pemuda. Di tahun 2025, Asisten Deputi menitikberatkan pelatihan ini pada transformasi mentalitas anggota pramuka dan komunitas pemuda agar tidak hanya memiliki karakter yang kuat, tetapi juga memiliki daya tahan ekonomi yang mandiri. Hal ini krusial mengingat tantangan global menuntut organisasi kepemudaan untuk mampu mengelola sumber daya secara profesional dan berkelanjutan.

Pelatihan ini secara khusus menyasar segmen pemuda usia 16 hingga 30 tahun, yang mencakup Pramuka Penegak, Pandega, serta penggerak komunitas pemuda. Materi pelatihan dirancang untuk menjembatani kesenjangan antara kurikulum organisasi tradisional dengan kebutuhan industri modern, seperti manajemen keuangan organisasi, kewirausahaan sosial (social entrepreneurship), dan literasi digital. Dengan fokus pada kemandirian, pemuda didorong untuk menciptakan model unit usaha di dalam organisasi yang dapat menjadi motor penggerak kegiatan tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran eksternal.

Manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah terciptanya kader-kader pemimpin yang memiliki jiwa kewirausahaan (entrepreneurial mindset) dan kemampuan manajerial yang mumpuni. Bagi organisasi kepramukaan dan komunitas, pelatihan ini memperkuat struktur internal dalam mengelola potensi lokal menjadi nilai ekonomi. Secara nasional, keberhasilan pelatihan ini berkontribusi pada peningkatan skor Domain Lapangan Kerja dan Kewirausahaan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), sekaligus menyiapkan generasi muda yang lebih siap menghadapi persaingan di pasar kerja maupun dunia usaha.

Tabel 8 Kegiatan Pelatihan

No.	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	10-12 November 2025	Jawa Barat	50 Peserta
2.	12-14 November 2025	Jawa Tengah	50 Peserta
3.	15-17 November 2025	Bali	50 Peserta
4.	16-18 November 2025	Yogyakarta	50 Peserta
5.	18-20 November 2025	Kalimantan Barat	50 Peserta
6.	17-19 November 2025	Sumatra Barat	50 Peserta
7.	12-14 Desember 2025	Surabaya	50 Peserta
8.	14-16 Desember 2025	Banten	50 Peserta

2. Bantuan Lembaga Kepramukaan

Penyaluran Bantuan Lembaga Kepramukaan merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam aspek fasilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 40 Tahun 2009. Bantuan ini diberikan kepada Kwarnas, Satuan Karya (Saka), dan Satuan Komunitas (Sako) sebagai dukungan penguatan infrastruktur dan operasional organisasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa lembaga-lembaga ini memiliki kapasitas yang memadai untuk menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan bagi pemuda usia 16-30 tahun di seluruh pelosok Indonesia, sehingga proses kaderisasi pemimpin bangsa tidak terhambat oleh keterbatasan sumber daya.

Dalam konteks tahun 2025, bantuan ini diarahkan untuk mendukung modernisasi program kerja lembaga kepramukaan agar lebih relevan dengan gaya hidup dan aspirasi pemuda masa kini. Dukungan ini memungkinkan lembaga untuk mengoptimalkan pusat-pusat pelatihan, mengadakan forum-forum peningkatan kapasitas, serta melakukan standardisasi kurikulum pembinaan di tingkat daerah. Dengan dukungan finansial dan pendampingan yang tepat, lembaga kepramukaan dapat bertransformasi menjadi organisasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, pengabdian masyarakat, dan teknologi informasi.

Manfaat yang dirasakan secara langsung adalah terjaminnya stabilitas dan kontinuitas kegiatan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah. Lembaga kepramukaan mampu memperluas jangkauan pembinaannya kepada pemuda usia 16-30 tahun yang sebelumnya mungkin belum terjamah oleh program-program pemerintah. Secara makro, bantuan ini memperkuat ekosistem organisasi kepemudaan nasional, meningkatkan skor Domain

Partisipasi dan Kepemimpinan pada IPP, serta memastikan bahwa nilai-nilai kebangsaan tetap terinternalisasi melalui wadah organisasi yang sehat, kuat, dan mandiri.



Gambar 5 Pelatihan di Bali



Gambar 6 Pelatihan di Banten



Gambar 7 Pelatihan di Jawa Barat



Gambar 8 Pelatihan di Yogyakarta



Gambar 9 Pelatihan di Kalimantan Barat



Gambar 10 Pelatihan di Jawa Tengah



Gambar 11 Pelatihan di Sumatra Barat



Gambar 12 Pelatihan di Surabaya

Analisis Keberhasilan :

Pelatihan Pemberdayaan Kemandirian

Keberhasilan kegiatan pelatihan ini diukur dari terjadinya pergeseran paradigma (mental shift) pada anggota organisasi kepramukaan dan komunitas pemuda usia 16-30 tahun. Jika sebelumnya organisasi cenderung bersifat konsumtif dan bergantung sepenuhnya pada iuran atau bantuan pemerintah, pasca-pelatihan ini muncul inisiatif unit usaha mandiri yang dikelola oleh Pramuka Penegak dan Pandega. Analisis menunjukkan bahwa integrasi materi kewirausahaan sosial berhasil meningkatkan kepercayaan diri pemuda dalam mengelola potensi ekonomi di lingkungan organisasi mereka.

Secara teknis, keberhasilan ini terlihat dari meningkatnya kapasitas manajerial para pengurus organisasi dalam menyusun rencana bisnis (business plan) yang aplikatif. Berdasarkan evaluasi pasca-kegiatan, terdapat peningkatan signifikan pada literasi finansial peserta. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran pemuda, karena keterampilan yang didapat dalam pelatihan ini tidak hanya berguna bagi organisasi, tetapi juga menjadi bekal portofolio profesional bagi pemuda usia 16-30 tahun saat memasuki pasar kerja atau membangun usaha pribadi.

Manfaat strategis dari keberhasilan ini adalah terciptanya ekosistem organisasi yang berkelanjutan. Organisasi kepramukaan yang mandiri secara ekonomi akan memiliki daya tahan lebih kuat terhadap dinamika eksternal dan mampu menyelenggarakan kegiatan pembinaan secara lebih mandiri dan masif. Secara makro, keberhasilan ini berkontribusi pada kenaikan skor Domain Lapangan Kerja dan Kewirausahaan dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional.

Bantuan Lembaga Kepramukaan

Keberhasilan penyaluran Bantuan Lembaga Kepramukaan pada tahun 2025 dianalisis melalui parameter stabilitas operasional dan perluasan jangkauan pembinaan. Bantuan ini berhasil menjadi stimulus bagi Kwarnas, Saka, dan Sako untuk melakukan modernisasi sarana serta program kerja. Tanpa adanya kendala sumber daya yang berarti, lembaga-lembaga ini mampu menjalankan roda organisasi secara konsisten sepanjang tahun, sehingga proses kaderisasi pemimpin bangsa pada rentang usia 16-30 tahun tidak mengalami stagnasi atau diskontinuitas.

Analisis keberhasilan juga terlihat pada peningkatan efektivitas koordinasi antara Satuan Karya (Saka) dan Satuan Komunitas (Sako) dengan pemangku kepentingan terkait. Bantuan ini memfasilitasi pelaksanaan program-program yang lebih berkualitas, seperti pelatihan kepemimpinan tingkat lanjut dan aksi pengabdian masyarakat yang lebih terstruktur. Dengan dukungan ini, lembaga kepramukaan mampu menyerap lebih banyak aspirasi pemuda, yang dibuktikan dengan meningkatnya angka partisipasi anggota muda dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan yang bersifat inovatif dan berbasis teknologi.

Manfaat fundamental dari capaian ini adalah penguatan tata kelola lembaga (*good governance*). Dengan pendampingan dan bantuan yang diberikan, lembaga kepramukaan didorong untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan fungsinya sebagai wadah pengembangan karakter. Hal ini secara langsung memperkuat Domain Partisipasi dan Kepemimpinan pada IPP, serta memastikan bahwa negara hadir secara nyata dalam mendukung organisasi yang menjadi ujung tombak pembangunan moral dan etika generasi muda sesuai amanat UU No. 40 Tahun 2009.

Kegiatan Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan capaian IK3 ini sebesar **100%**, yaitu telah terealisasi 15 Lembaga dari yang di targetkan Prioritas Nasional (PN) 15 Lembaga, sebagaimana berikut:



Realisasi Anggaran untuk **IK3** pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Pagu Anggaran** : Rp 3.639.162.000,- (Tiga Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah)
- **Realisasi Anggaran** : Rp 3.601.347.149,- (Tiga Miliar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Sembilan Rupiah)
- **Persentase Realisasi** : **98,98 %.**

3.2.4 Indikator Kinerja 4

Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan

100%

IK4

INDIKATOR KINERJA 4

Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan merupakan ukuran kinerja yang menggambarkan upaya Asdep Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda dalam memperkuat kapasitas kelembagaan, tata kelola, serta peran strategis organisasi dan komunitas pemuda. Pendampingan ini diarahkan untuk mendorong organisasi kepemudaan agar mampu beradaptasi dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan pembangunan nasional, serta berkontribusi secara aktif dalam pemberdayaan pemuda dan penguatan karakter kebangsaan.

Melalui indikator ini, Asdep berperan sebagai fasilitator dan katalisator dalam proses pembinaan, peningkatan kompetensi, jejaring kolaborasi, serta pengembangan inovasi program yang diinisiasi oleh organisasi dan komunitas pemuda. Pendampingan dilakukan secara partisipatif dan berkelanjutan agar organisasi kepemudaan memiliki daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan program.

Komunitas Fest merupakan kegiatan strategis dalam rangka implementasi indikator Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan. Kegiatan ini dirancang sebagai ruang temu, ekspresi, dan kolaborasi bagi berbagai komunitas dan organisasi pemuda dari beragam latar belakang minat, bakat, dan bidang aktivitas.

Komunitas Fest berfungsi sebagai wadah pendampingan terpadu yang mencakup fasilitasi peningkatan kapasitas komunitas, pertukaran praktik baik (best practices), penguatan jejaring antar komunitas, serta pengenalan inovasi dan kreativitas pemuda. Melalui berbagai rangkaian kegiatan seperti pameran komunitas, diskusi tematik, lokakarya, pertunjukan kreatif, dan forum jejaring, Komunitas Fest mendorong komunitas pemuda untuk memperkuat identitas organisasi, meningkatkan kualitas program, serta memperluas dampak sosial di lingkungan masing-masing.

Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk menjaring aspirasi, memetakan potensi, dan mengidentifikasi kebutuhan riil organisasi dan

komunitas pemuda sebagai dasar perumusan kebijakan dan program kepemudaan yang lebih responsif dan tepat sasaran.

a. Nilai Manfaat Kegiatan Komunitas Fest

Pelaksanaan Komunitas Fest memberikan berbagai nilai manfaat strategis, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan

Komunitas Fest membantu meningkatkan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan keberlanjutan organisasi melalui pendampingan, pembelajaran bersama, dan berbagi praktik baik antar komunitas.

2. Penguatan Jejaring dan Kolaborasi

Kegiatan ini mempertemukan berbagai komunitas dan pemangku kepentingan sehingga tercipta jejaring kolaborasi lintas sektor, lintas komunitas, dan lintas wilayah yang memperkuat ekosistem kepemudaan.

3. Pendorong Inovasi dan Kreativitas Pemuda

Komunitas Fest menjadi ruang aktualisasi ide, kreativitas, dan inovasi pemuda yang berkontribusi pada solusi permasalahan sosial, budaya, dan pembangunan di tingkat lokal maupun nasional.

4. Peningkatan Partisipasi dan Peran Aktif Pemuda

Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, kegiatan ini mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab sosial.

5. Bahan Perumusan Kebijakan yang Responsif

Informasi dan aspirasi yang dihimpun dari komunitas pemuda melalui Komunitas Fest menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan program kepemudaan yang lebih adaptif dan berbasis kebutuhan lapangan.





Gambar 13 Kegiatan Fasilitasi Komunitas Fest

Analisis Keberhasilan :

Keberhasilan kegiatan Komunitas Fest dalam mendukung indikator Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan dapat dianalisis dari ketercapaian tujuan, efektivitas

pelaksanaan, serta dampak yang dihasilkan bagi organisasi dan komunitas pemuda.

Pertama, dari aspek ketercapaian tujuan, Komunitas Fest berhasil menjadi media pendampingan yang efektif bagi organisasi dan komunitas pemuda. Kegiatan ini mampu menghadirkan ruang interaksi, pembelajaran, dan kolaborasi yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan dan pengembangan komunitas. Partisipasi aktif komunitas pemuda dalam berbagai rangkaian kegiatan menunjukkan bahwa desain program relevan dan selaras dengan kebutuhan aktual organisasi kepemudaan.

Kedua, dari sisi efektivitas pelaksanaan, Komunitas Fest dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan inklusif, yang memungkinkan komunitas pemuda terlibat tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai subjek kegiatan. Pola pendampingan yang dikemas dalam bentuk pameran, diskusi, lokakarya, dan forum jejaring terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman komunitas terhadap pengelolaan organisasi, pengembangan program, serta penguatan identitas dan eksistensi komunitas. Sinergi antara pemerintah, komunitas pemuda, dan pemangku kepentingan lainnya turut memperkuat kualitas pelaksanaan kegiatan.

Ketiga, dari aspek output dan outcome, Komunitas Fest menghasilkan peningkatan jejaring antar komunitas pemuda, terbentuknya peluang kolaborasi program, serta meningkatnya kapasitas organisasi dalam menyusun dan mengembangkan kegiatan yang berkelanjutan. Komunitas peserta memperoleh pengalaman langsung dalam mempresentasikan aktivitas, inovasi, dan dampak sosial yang telah dihasilkan, sehingga mendorong peningkatan kepercayaan diri dan profesionalisme organisasi kepemudaan.

Keempat, dari sisi dampak jangka menengah, Komunitas Fest berkontribusi pada penguatan ekosistem kepemudaan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan inovatif. Informasi dan aspirasi yang terhimpun selama kegiatan menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan pembinaan organisasi kepemudaan yang lebih tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berhenti pada pencapaian output, tetapi juga memberikan nilai strategis bagi peningkatan kualitas kebijakan dan program kepemudaan ke depan.

Secara keseluruhan, keberhasilan Komunitas Fest tercermin dari kemampuannya menjawab tujuan indikator pendampingan organisasi kepemudaan, meningkatkan kapasitas dan peran komunitas pemuda, serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan pemuda. Dengan demikian, Komunitas Fest dapat dinilai sebagai kegiatan yang efektif dan relevan dalam

mendukung pencapaian kinerja Asdep Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda Tahun 2025.

Kegiatan Pendampingan Organisasi Kepemudaan Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan telah dilaksanakan pada tahun 2025 dengan capaian IK4 ini sebesar **100%**, yaitu telah terealisasi 25 Lembaga dari yang di targetkan Prioritas Nasional (PN) 25 Lembaga, sebagaimana berikut:



Realisasi Anggaran untuk **IK4** pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- **Pagu Anggaran** : Rp 1.384.878.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
- **Realisasi Anggaran** : Rp 1.358.212.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah)
- **Persentase Realisasi** : **98,07 %.**

3.3 Realisasi Anggaran

Anggaran pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda Tahun Anggaran 2025 adalah Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025 pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda No. DIPA : SP.DIPA-092.01.1.694826/2025; tanggal 2 Desember 2024 sebesar 14.036.080.000,- (Empat Belas Miliar Tiga Puluh Enam Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan capaian realisasi sebesar Rp 8.639.915.763,- (Delapan Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah) atau 99,08% dari pagu.

3.4 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagai penjelasan terhadap capaian kinerja tersebut di bawah ini dilakukan analisis capaian kinerja Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Pada penjelasan sub bab bagian indikator kinerja masing-masing sudah diterangkan berapa biaya yang sudah dilaksanakan dalam mencapai capaian kinerja tersebut berdasarkan anggaran yang ada.

1. Penyerapan Anggaran

Pengukuran penyerapan anggaran dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : penyerapan anggaran

RA : realisasi anggaran

AA : alokasi anggaran

RA : 8.639.915.763

AA : 8.720.265.000

$$P = \frac{8.639.915.763}{8.720.265.000} \times 100\%$$

$$P = 99,08\%$$

2. Capaian

Pengukuran capaian keluaran di unit kerja kami dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$C = \left(\prod_{j=1}^m \left(\prod_{k=1}^n \frac{RIOK_j}{TIOK_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan :

C : capaian

RIOK_j : realisasi indikator output kegiatan j

TIOK_j : target indikator output kegiatan j

m : jumlah output kegiatan suatu kegiatan

n : jumlah indikator suatu output kegiatan

Tabel 9 Capaian

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TIOK	RIOK	REALISASI IOK (%)	CAPAIAN per OK	COP per Kegiatan
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	SK1	IK 1	15	15	100%	106,25%	106,25%
		IK 2	400	500	125%		
		IK 3	15	15	100%		
		IK 4	25	25	100%		

3. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rumus berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA_i \times CK_i) - RA_i)}{\sum_{i=1}^n (AA_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : efisiensi

AA_i : alokasi anggaran i

RA_i : realisasi anggaran i

CK_i : capaian kinerja i

n : jumlah indikator

Tabel 10 Efisiensi

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA x CK	(AA x CK) - RA
	(CK)				
IK 1	100%	2.808.265.00 0	2.795.106.61 4	2.808.265.000	13.158.386
IK 2	125%	887.960.000	884.650.000	6.437.710.000	5.553.060.000
IK 3	100%	3.639.162.00 0	3.601.347.14 9	3.639.162.000	37.214.851
IK 4	100%	1.384.878.00 0	1.358.212.00 0	1.384.878.000	26.666.000
JUMLAH		8.720.265.00 0	8.639.915.76 3	14.270.015.000	5.630.099.237
Efisiensi				64,56%	

Maka Nilai Efisiensinya digunakan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

$$NE = 50\% + \left(\frac{64,56\%}{20} \times 50 \right)$$

$$NE = 100\%$$

Berdasarkan ketentuan bahwa Penilaian Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja adalah sama dengan Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja. Dalam hal ini Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda mendukung Nilai kinerja anggaran yang ada di satuan kerja sehingga ruang lingkup dan data yang kami sajikan adalah data yang berada pada unit kerja kami, untuk penilaiannya setiap variabel aspek implementasi sebagai berikut:

- a. Capaian sebesar 225%
- b. Efisiensi sebesar 64,56%
- c. Penyerapan sebesar 99,08%

3.5 Dukungan Terhadap Prioritas Nasional

Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pendampingan organisasi serta lembaga kepemudaan merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam mendukung Prioritas Nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia, khususnya peningkatan kualitas dan daya saing pemuda Indonesia. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Asdep Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda berkontribusi langsung terhadap penguatan karakter, partisipasi, prestasi, dan peran strategis pemuda dalam pembangunan nasional.

a. Bantuan Organisasi Kepemudaan (Good Game)

Kegiatan Bantuan Organisasi Kepemudaan melalui program *Good Game* mendukung Prioritas Nasional pembangunan SDM yang berkarakter, sehat, dan berdaya saing. Program ini mendorong penguatan nilai-nilai sportivitas, kerja sama, disiplin, dan kepemimpinan di kalangan pemuda melalui pendekatan aktivitas positif dan produktif. Dukungan yang diberikan kepada organisasi kepemudaan memperkuat kapasitas kelembagaan serta memperluas jangkauan program pembinaan karakter pemuda di tingkat komunitas.

b. Partisipan Peringatan Hari Sumpah Pemuda (HSP)

Keikutsertaan pemuda dan organisasi kepemudaan dalam Peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan bentuk dukungan terhadap Prioritas Nasional penguatan karakter kebangsaan dan persatuan nasional. Kegiatan ini menumbuhkan kesadaran sejarah, semangat nasionalisme, serta

komitmen pemuda terhadap nilai persatuan dan kebhinekaan. Partisipasi aktif pemuda dalam HSP juga memperkuat peran mereka sebagai agen perubahan dan perekat sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Partisipan Indonesia Sport Summit (ISS)

Kegiatan partisipasi pemuda dalam Indonesia Sport Summit mendukung Prioritas Nasional pengembangan SDM unggul melalui peningkatan prestasi, kesehatan, dan industri olahraga. Keterlibatan pemuda dalam forum nasional ini membuka ruang peningkatan kapasitas, jejaring, dan wawasan terkait pengembangan ekosistem olahraga. Selain itu, ISS mendorong kolaborasi lintas sektor yang berkontribusi pada pembinaan pemuda berprestasi dan berdaya saing global.

d. FGD Karakter Pengembangan Pemuda

Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Karakter Pengembangan Pemuda secara langsung mendukung Prioritas Nasional pembangunan manusia yang berkarakter, adaptif, dan berintegritas. FGD ini menjadi wadah partisipatif untuk merumuskan strategi, pendekatan, dan kebijakan pengembangan karakter pemuda yang relevan dengan tantangan zaman. Hasil FGD menjadi dasar penguatan kebijakan kepemudaan yang berorientasi pada pembentukan nilai moral, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial pemuda.

e. Bantuan Lembaga Kepemudaan

Kegiatan Bantuan Lembaga Kepemudaan mendukung Prioritas Nasional penguatan kelembagaan dan tata kelola pembangunan SDM. Bantuan ini memperkuat peran lembaga kepemudaan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pelaksanaan program pembinaan dan pemberdayaan pemuda. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, lembaga kepemudaan diharapkan mampu menjalankan program yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi pengembangan potensi pemuda.

f. Bantuan Lembaga Kepemudaan (Komunitas Fest)

Bantuan Lembaga Kepemudaan melalui kegiatan Komunitas Fest mendukung Prioritas Nasional peningkatan kualitas partisipasi pemuda dan penguatan ekosistem kepemudaan. Komunitas Fest menjadi ruang kolaborasi, inovasi, dan ekspresi pemuda yang mendorong kreativitas, kewirausahaan sosial, serta jejaring antar komunitas. Kegiatan ini berkontribusi pada penguatan peran pemuda dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya, sekaligus memperluas dampak program kepemudaan secara inklusif dan berkelanjutan.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda tahun 2025. Penetapan kinerja yang berisi target-target kinerja, pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dapat dipertanggungjawabkan dan dituangkan dalam Laporan Kinerja. Dari uraian pencapaian kinerja, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi, sebagaimana kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan Organisasi dan Komunitas Pemuda.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda (ASDEP TKOKP) sepanjang Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Sasaran:

Secara umum, ASDEP TKOKP telah berhasil memenuhi dan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. [cite_start]Rata-rata capaian seluruh sasaran program/kegiatan mencapai 225%, yang menunjukkan efektivitas tinggi dalam pelaksanaan fungsi fasilitasi dan pembinaan.

2. Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU):

- IK 1 (Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga):

Tercapai 100% dengan 15 lembaga yang difasilitasi melalui program-program inovatif seperti Good Game, Klub Berkawan, dan Gerbangtara.

- IK 2 (Fasilitasi dan Pengembangan Masyarakat):

Mencapai capaian luar biasa sebesar 725%, dengan melayani 2.900 orang dari target awal 400 orang, terutama melalui penguatan kader kewirausahaan dan partisipasi dalam Hari Sumpah Pemuda.

- IK 3 (Pendampingan Organisasi Kepramukaan):

Tercapai 100% (15 lembaga), yang difokuskan pada transformasi mentalitas kemandirian ekonomi anggota Pramuka.

- IK 4 (Pendampingan Organisasi Kepemudaan):

Tercapai 100% (25 lembaga) melalui kegiatan strategis seperti Komunitas Fest untuk memperkuat jejaring kolaborasi.

3. Akuntabilitas Keuangan:

Pengelolaan anggaran tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang sangat optimal, yaitu sebesar 99,08% atau terealisasi sejumlah Rp 8.639.915.763,- dari pagu anggaran yang tersedia. Hal ini mencerminkan prinsip transparansi dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya negara.

4. Kontribusi Strategis:

Keberhasilan kinerja ASDEP TKOKP di tahun 2025 berkontribusi langsung terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), khususnya pada domain partisipasi, kepemimpinan, serta lapangan kerja dan kewirausahaan. Transformasi yang dilakukan telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai digital dan inovasi ke dalam struktur organisasi tradisional seperti Gerakan Pramuka dan OKP.

Secara keseluruhan, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda telah menjalankan mandatnya sebagai katalisator pembangunan pemuda yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus meletakkan fondasi yang kuat menuju visi Indonesia Emas 2045.

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi Perbaikan

Meskipun secara umum target kinerja tahun 2025 telah tercapai dengan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala dan permasalahan mendasar yang menghambat optimalisasi program transformasi kepemudaan, antara lain:

- Resistensi terhadap Transformasi Digital:

Proses modernisasi kurikulum kepramukaan dan sistem digitalisasi di tingkat akar rumput (Gugus Depan/Kwartir) masih menghadapi kendala berupa kesenjangan literasi digital antar-pembina dan pengurus organisasi.

- Stagnasi Regenerasi Organisasi:

Terdapat indikasi melambatnya proses kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan pada sejumlah Organisasi Kepemudaan (OKP) yang tidak berjalan sesuai AD/ART, sehingga menurunkan keaktifan organisasi sebagai mitra pemerintah.

- Fragmentasi Komunitas Pemuda:

Munculnya fenomena komunitas berbasis minat yang berjalan secara sporadis (sendiri-sendiri) tanpa arah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional, sehingga potensi besarnya belum berdampak signifikan terhadap kenaikan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

- Ketergantungan Anggaran:

Masih tingginya ketergantungan organisasi dan komunitas pemuda terhadap bantuan APBN/APBD, sementara model kemandirian ekonomi atau kemitraan dengan sektor swasta belum terbangun secara kuat.

- Kelemahan Sistem Monitoring di Daerah:

Terbatasnya jangkauan pengawasan langsung ke wilayah terpencil menyebabkan sulitnya mengukur efektivitas dan dampak bantuan fasilitasi secara akurat di tingkat daerah.

Pemecahan Masalah dan Upaya Perbaikan

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi, dan Komunitas Pemuda merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya perbaikan sebagai berikut:

- Akselerasi Literasi Digital dan Pendampingan:

Melakukan bimbingan teknis yang lebih intensif bagi pembina organisasi di tingkat daerah untuk mempercepat adopsi teknologi informasi dalam tata kelola organisasi dan kurikulum pembinaan.

- Penguatan Ekosistem Terintegrasi:

Membangun wadah kolaborasi (seperti program Komunitas Fest) yang mampu menyatukan berbagai komunitas lintas sektor dan minat ke dalam satu ekosistem yang selaras dengan Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan (RAN-PK).

- Transformasi Mentalitas Kemandirian:

Mendorong organisasi kepemudaan dan kepramukaan untuk mengembangkan model unit usaha atau kewirausahaan sosial (social entrepreneurship) agar memiliki daya tahan ekonomi dan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.

- Optimalisasi Koordinasi Lintas Sektor:

Meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR) untuk memperluas jangkauan pembinaan dan dukungan sarana prasarana kepemudaan.

- Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi:

Mengembangkan sistem informasi dan pelaporan berbasis digital yang lebih kuat untuk memastikan setiap program bantuan di daerah dapat terpantau realisasinya secara real-time dan tepat sasaran.

LAMPIRAN

LAMPIRAN



KEMENTERIAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel dan berorientasi pada outcome, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng
Jabatan : Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi
Dan Komunitas Pemuda

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji:

1. Akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini;
2. Akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya mencapai target kinerja;
3. Akan melaporkan pencapaian kinerja secara berkala kepada pihak kedua;
4. Akan mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia untuk pencapaian target kinerja;
5. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan siap menerima sanksi atas segala kegagalan yang terjadi.

Pihak kedua akan:

1. Melakukan evaluasi dan supervisi terhadap upaya-upaya yang dilakukan dan capaian kinerja yang dihasilkan dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2025

Pihak Kedua,

Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si

Pihak Pertama,

Dr. Ir. Hendro Wicaksono, MSc.Eng.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
ASISTEN DEPUTI TRANSFORMASI KEPRAMUKAAN ORGANISASI
DAN KOMUNITAS PEMUDA**

NO (1)	SASARAN KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA		TARGET (4)
		(3)		
1	Meningkatnya pembinaan organisasi kepramukaan, organisasi, dan komunitas pemuda tingkat nasional	1.1	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda	4 rekомендации
		1.2	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda yang menjadi kebijakan	
		1.3	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosial masyarakat	75,79%
		1.4	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	5,65%
		1.5	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	1,48%
		1.6	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria bidang transformasi kepramukaan, organisasi dan komunitas pemuda	1 NSPK
		1.7	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	90,06
2	Terselenggaranya layanan Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang berkinerja efektif, profesional dan melayani	2.1	Jumlah laporan kinerja pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda yang tersusun dan termenfaatkan	4 dokumen
		2.2	Persentase serapan anggaran pada Asisten Deputi Transformasi Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas Pemuda	

Kegiatan
Transformasi Kepramukaan, Organisasi
dan Komunitas Pemuda

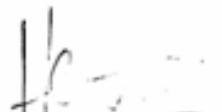
Anggaran
Rp. 14.036.080.000

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan,



Dr. Drs. Yohan, S.Pd, M.Si.

Jakarta, Juli 2025
Asisten Deputi Transformasi
Kepramukaan Organisasi dan
Komunitas Pemuda,



Dr. Ir. Hendar Wicaksono, MSc.Eng